



## Bantuan Dana Adat-Subak Masuk APBDes

SINGARAJA, NusaBali

Bantuan keuangan khusus (BKK) untuk Desa Pakraman dan Subak se Buleleng, akhirnya harus diploting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan. Kendati demikian, penentuan pos terhadap BKK tersebut masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Pemprov Bali.

"Kami masih menunggu petunjuk dari Provinsi, sehingga masuk pos mana BKK itu, akan terjawab melalui petunjuk itu. Nanti kami tinggal mengikuti petunjuk yang ada," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Buleleng, I Gede Sandhiyasa dikonfirmasi Minggu (11/10).

Dijelaskan, dari hasil konsultasi ke Pemprov Bali belum lama ini, pihak Pemprov sudah mengkomodir persoalan yang sempat muncul terhadap pencairan BKK Adat dan Subak tersebut. Pemprov Bali disebutkan, akan menrevisi poin dalam pasal Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait dengan pencairan BKK tersebut.

"Nanti akan ada revisi SK Gubernur, intinya permasalahan yang sempat muncul sudah bisa diselesaikan, sekarang kami tinggal tunggu petunjuk untuk merancang dalam APBDes Perubahan," jelas Sandhiyasa.

Mantan Camat Buleleng ini menegaskan, BKK adat dan subak tersebut dipastikan dirancang dalam APBDes Perubahan, karena APBDes Induk sudah berjalan. Diperkirakan, penyusunan APBDes Perubahan di masing-masing desa, pada akhir bulan Oktober ini. "Kalau petunjuknya sudah turun, kita langsung sosialisasikan, sehingga masing-masing desa sudah bisa merancang penyusunan APBDes Perubahan. Saya kira penyusunan itu (APBDes Perubahan, red)

cepat, karena sifatnya perubahan," ujar Sandhiyasa.

Provinsi Bali memberikan BKK bagi masing-masing Desa Pakraman di tahun 2015 ini sebesar Rp 200 juta. Sedangkan bagi masing-masing subak, baik itu subak abian dan subak sawah sebesar Rp 50 juta.

Nah, sebelumnya sempat terjadi tarik ulur dalam proses pencairan dana BKK tersebut. Sehingga baik adat maupun subak belum bisa memanfaatkan dana tersebut hingga memasuki bulan Oktober 2015.

Pihak Desa Pakraman minta agar dana yang sudah dicairkan oleh Provinsi melalui rekening Desa Dinas, agar bisa diserahkan ke adat agar secepatnya dimanfaatkan. Keinginan itu mengacu pada pola pengelolaan tahun sebelumnya, dimana dana BKK itu langsung bisa dimanfaatkan oleh pihak Desa Pakraman. "Kami belum bisa memanfaatkan, jelas program-program kami belum ada terlaksana. Pasraman Remaja sama sekali belum ada yang terlaksana, kegiatan fisik juga tersedat," terang Ketua MMDP Kabupaten Buleleng Desa Putu Budarsana.

Sedangkan dari pihak Desa Dinas belum berani mencairkan dana BKK tersebut, kendati sudah masuk ke rekening desa. Masalahnya, dana tersebut kini harus masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sesuai dengan Permendagri bernomor; 113 Tahun 2014. Celakanya, untuk memasukkan BKK tersebut ke APBDes, harus menunggu APBDes Perubahan yang diperkirakan baru mulai disusun oleh masing-masing desa dinas pada bulan November mendatang. **k19**

Edisi : Senin, 12 Oktober 2015

Hal : 4